

PEREMPUAN DALAM POLITIK MEDIA

Siti Raudhatul Jannah¹

Dosen Komunikasi Jurnalistik Jurusan Dakwah STAIN Jember
Jannahnusa@yahoo.com

Abstract

The image of women in history is a wrenching day. Women's history is a history of continuous oppression. How native women in the Netherlands Colonialism era are treated also suggests common view time on women. The Founder of Batavia, Jan Pieterszoon Coen writing ' of women is a prerequisite in the trade. If women are available in the markets of the Indian trade, will be yours ' such declared Coen to the Heren XVII. And then the letter marked the beginning of days of misery for native women.

Present, the condition was not getting lost, instead of the more. The mass media obviously contribute very unusual about the image to the woman. Massa Media capture is dominated by very bad image of women as a bully, destroyer husband career and others. In the political that very masculine image more bad, women only placed the stage just as a sweetener. While many ordinary women with remarkable achievement less get a place in the mass media.

This writing offered a recitation against women especially in Indonesia. The way of us read would determine our attitude and behavior against women which in turn will encourage everyone to put the figure corresponding undue women. Reward them elsewhere in the public and private space.

Keywords: *Perempuan, Media Massa, Fitrah, Publik, dan Privat.*

Pendahuluan: Melongok Sosok Perempuan di Masa Silam

Jan Pieterszoon Coen, pendiri Batavia, kebingungan mengatasi ketiadaan perempuan kala menjajah Nusantara. Pegawai Kompeni yang datang ke Indonesia semuanya adalah laki-laki dan dalam jumlah sangat banyak. Pada

¹ Mantan Wartawan dan redaktur Harian Umum NusaBali, Mendapat Shortcourse Media Aviation dari Singapore Airline di Singapura, Mendapat Diklat Keredakturan dari Lembaga Pers Dr.Sutomo di Jakarta, Magang Tabloid Nyata di Jakarta, Mahasiswa S3 Universitas Airlangga Surabaya.

awalnya perempuan pribumi dianggapnya sedemikian kotor dan tidak memiliki kesopanan dan peradaban sehingga tidak layak untuk dijadikan istri dan ibu dari anak-anak para pembesar Belanda berusaha mengatasi hal ini dengan mencoba meminta kiriman anak gadis yang berumur antara 10-12 tahun dari rumah-rumah yatim piatu di *Verenigde Provincien*. Dengan demikian di Batavia, yang pada masa itu merupakan pusat dari segala kegiatan Kompeni di Asia, terdapat banyak keluarga yang terhormat yaitu perkawinan pegawai Kompeni dengan gadis-gadis yang mewarisi sifat-sifat baik keluarga Belanda.²

Dalam surat permohonannya Coen menulis “Perempuan adalah prasyarat dalam berdagang. Jika perempuan tersedia di pasar-pasar perdagangan, Hindia akan menjadi milik Anda” demikian dinyatakan Coen kepada *Heren XVII*. Sayangnya, kapal *Wapen van Horn* yang berlabuh di Batavia hanya membawa perempuan lusuh yang menurut Coen seolah-olah bukan asuhan manusia melainkan berasal dari hutan rimba, tak jauh dari kondisi para perempuan pribumi. Oleh karena itu hanya dalam satu dasawarsa upaya mendatangkan perempuan Belanda dilakukan.

Dampak dari kegagalan proyek mendatangkan perempuan Belanda terhormat ini mengakibatkan masalah tersendiri bagi perempuan Indonesia. Banyak perempuan pribumi dijadikan pasangan hidup namun tak dijadikan istri. Seorang laki-laki Belanda yang telah kawin dengan seorang perempuan pribumi tak bisa pulang kembali ke negeri Belanda dengan membawa anak istrinya.

Peraturan tidak mengizinkan istri dan anak-anaknya dibawa serta. Maka tidak mengherankan bila banyak pegawai Kompeni yang lebih suka hidup dengan *Nyai-nyai*. Kapan saja ia memutuskan pulang kembali ke tanah air ia bisa membebaskan diri dari ikatan dengan gundik-gundiknya, dan di tanah airnya sendiri memilih istri yang diimpi-impikan serta diharapkan untuk menjadi teman hidupnya.

Pelacuran pun merajalela, sebagaimana layaknya di dalam masyarakat dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang timpang. Banyak surat-surat pengaduan dari istri yang mengadukan suaminya yang memaksa

² Perempuan Era Kolonialisasi, *Hidayatullah.com*, 1 Juni 2002.

dirinya menjadi pelacur demi kepentingan uang. Dampak dari semua itu begitu banyak penguguran kandungan, pembunuhan bayi, atau terlahirnya anak tak berdosa dengan predikat anak jadah atau anak haram. Pada masa itu begitu banyak pasangan hidup secara kumpul kebo.

Banyak para orang tua pribumi yang kehilangan anak gadisnya. Mereka diambil paksa dengan atau tanpa sepengetahuan orang tuanya. Pertama mereka diperiksa gigi dan badannya. Jika dianggap sehat mereka dibersihkan, dimandikan berkali-kali, dan diajari sopan santun Belanda. Satu orang pegawai Kompeni jarang yang hanya memiliki satu gundik. Rata-rata mereka memiliki beberapa gundik yang dipelihara. Nasib para gadis dalam kehidupan Kompeni banyak yang mengenaskan.

Sebuah kisah tragis dialami oleh gundik seorang pembesar Kompeni. Ia dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain, maka hukumannya sangat mengerikan; ia disiksa, ditelanjangi, dan dipertontonkan di depan umum. Masih banyak lagi kisah tragis yang dialami para wanita malang ini, mereka dipaksa untuk jadi pemuas nafsu para laki laki yang menurut Leonard Blusse, memiliki kebiasaan hidup yang luar biasa tidak sehat. Oleh karena itu, hanya 30 % dari pegawai Kompeni yang dapat kembali ke negerinya. Disamping karena perang. Mereka umumnya sangat senang memperturutkan hati terutama dalam hal perempuan dan mengkonsumsi minuman keras.

Anggle Perempuan di Media Massa

Media seringkali menempatkan *anggle*-sudut pandang bermuatan *stereotip* tertentu, meniadakan, bahkan mengabaikan perempuan. Dalam pemberitaan media massa kurun lima tahun terakhir, tokoh perempuan seringkali dalam posisi antagonis, sebagaimana tergambar dalam berita yang kerap menjadi headline dan di-running sehari-hari bahkan berganti bulan.

Sebut saja pemberitaan tentang pernikahan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif dengan istri keduanya. Pada Desember 2006, Liputan 6 SCTV menyiarkan bahwa politisi Partai Bintang Reformasi itu resmi dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR oleh partainya karena ia menikah lagi sehingga beristri dua. Si istri kedua dilambangkan sebagai terdakwa. Minimal sebagai penyebab kehancuran karier suaminya. Wakil rakyat dari Partai Bintang Reformasi ini dicopot dari jabatannya. karena dinilai kinerjanya buruk,

di antaranya karena beristri dua.

Mantan menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, juga langsung turun 'pangkat' setelah menikah lagi dengan perempuan muda bernama Rika Kato. Pernikahan kedua Yusril ini tak hanya menenggelamkan namanya sebagai kandidat calon presiden di Pemilu 2009 silam, namun juga jabatannya sebagai Mensesneg. Pengamat politik dari UI Prof Maswadi Rauf kepada detikcom, Rabu (16/7/2008), menegaskan bahwa tingkah laku seperti itu tidak akan mempengaruhi suara rakyat di Pilpres 2009 secara langsung, namun jelas mempengaruhi citranya. Padahal ada juga media yang memberitakan bahwa turunnya dia dari jabatannya karena dugaan korupsi di Setneg.

Tak hanya politisi, ulama kharismatik KH Abdullah Gymnastiar juga mengalami tekanan massa setelah media memberitakannya menikah lagi dengan Alfarini Eridani. Media gencar memberitakan betapa tertekannya istri pertama Aa' Gym, Nini Muthmainnah Muhsin, bahkan infotainment sampai merasa perlu membeberkan perasaan Teh Nini yang menangis pilu menyikapi pernikahan kedua suaminya. Media, sebagaimana digambarkan Radar Banten pada 4 Desember 2006, memberitakan bagaimana kegiatan Teh Nini setelah pernikahan suaminya. Media juga meliput rumah kontrakan istri baru Aa' Gym tersebut dan mendapati sebuah kenyataan bahwa belakang rumah tersebut terhubung langsung ke pesantren Aa' Gym.

Penggambaran media ini seakan melengkapi tuduhan massa yang cenderung melihat Alfarini, janda beranak tiga itu, sebagai pengganggu keutuhan rumah tangga Teh Nini, bahkan sebagai peselingkuh karena diam-diam mempunyai akses langsung ke kediaman Teh Nini. Berikut penggambaran Radar Banten.

Nah, dengan membaca berita ini, lengkaplah sudah sosok Rini sebagai tokoh yang antagonis. Dia digambarkan dari keluarga yang sederhana, padahal Aa' Gym kaya raya. Rini dan keluarganya jarang berhubungan sosial dengan para tetangga alias sosok yang tertutup, dia juga diimplisitkan sebagai pihak yang getol menghubungi (tepatnya merayu) Aa' Gym mengingat Aa' Gym tak pernah terlihat berkunjung ke rumah kontrakannya, sebaliknya, Rini yang aktif masuk ke kawasan pondok pesantren Daarut Tauhiid. Berangkat dari pencitraan ini pulalah, Rini sampai tidak berani menampilkan sosok-

nya di depan umum karena menghindari sasaran kebencian massa.

Belajar dari tiga kasus ini saja, tergambar bagaimana sosok perempuan yang kebetulan menjadi istri kedua, muncul sebagai biang kerok kerusakan harkat dan martabat suaminya yang kebetulan tokoh ternama di tanah air. Perempuan yang selalu digambarkan sebagai penghancur kebahagiaan istri pertama para pejabat tersebut, seakan disamakan dengan ikon mengerikan, sadis, raja tega, tak peduli terhadap kebahagiaan orang lain, dan ikon sejenis lainnya.

Bahkan pada gilirannya, media tidak hanya memberitakan hubungan seksual si perempuan kedua dengan sang tokoh ternama, namun merambat pada status sosial si perempuan yang ditampakkan sebagai drakula. Pun, kepada si suami, perempuan kedua tak ubahnya sebagai mahluk pembawa madu dan racun sekaligus di kedua tangannya.

Penggambaran media ini cukup efektif dalam menciptakan citra perempuan kedua di masyarakat sebagai pelaku kejahatan dengan modus aksi seksual. Tak kurang dari Presiden SBY, sampai berkomentar terhadap pernikahan Zaenal yang dianggap tidak lazim karena dilakukan terang-terangan.

Pada kasus yang lain, ada Maria Eva, penyanyi dangdut yang belum tenar, digambarkan menjadi perayu bagi anggota DPR dan petinggi Partai Golkar, Yahya Zaini. Keduanya diberitakan media telah berzina dan rekamannya diputar media hingga beberapa kali tayang. Massa-pun marah, Maria Eva didamprat habis-habisan, ditempatkan sebagai pelacur yang hina dina, sementara Yahya Zaini pada akhirnya diposisikan sebagai korban yang harus kehilangan jabatannya, status sosialnya, kehormatannya dan kini menghilang ke negeri seberang.

Stereotip terhadap perempuan di media massa juga muncul dari drama hukum yang melanda mantan ketua KPK Antasari Azhar *vis a vis* Nasrudin Zulkarnaen, menghadirkan sosok perempuan bernama Rani Juliani sebagai bintang utama di panggung berita media nasional. Seorang *caddy* golf di Tangerang muncul sebagai pemeran penting dalam kisah cinta-politis antara Antasari Azhari dan Nasrudin Zulkarnaen. Mengaca kepada berita tentang kasus ini, seksualitas dan politik saling berkelindan untuk melegitimasi kuasa maupun menghancurkan stigma.

Di ranah politik yang identik dengan ruang maskulin sehingga banyak

dihuni kaum pria, media menghadirkan perempuan untuk memberi gugatan dan pertanyaan terhadap dominasi politik. Padahal sebagai objek, perempuan sengaja dihadirkan agar elit politik tergoda. Dapat dikata, media men-cuatkan perempuan sebagai senjata ampuh untuk melakukan dekonstruksi kuasa dan deligitimasi citra elite politik. Dalam beberapa kasus, termasuk Bill Clinton-Monica, mengukuhkan stigma bahwa perempuan selalu menyimpan kisah dalam ruang konflik dan skandal politik elite kuasa.

Media menghadirkan ruang politik sebagai sebetuk wajah nan berhasrat dan usaha untuk menampilkan kepentingan dalam bungkus yang menawan.³ Di antaranya berbentuk seksualitas, di mana juga merupakan jebakan bagi tokoh politik, intelektual maupun agamawan. Subyek-subyek yang merdeka dengan kedudukan tinggi di ruang kekuasaan, dengan mudahnya dapat turun kasta akibat tak bisa melakukan manajemen asmara. Mereka terjebak oleh godaan dan berbagai rayuan, sehingga menjadi berita menggemparkan seperti terjadi pada rentetan kasus Cicak *Vs* Buaya.

Jalinan kekuasaan dengan seksualitas seolah tak pernah berhenti. Kedua ruang ini, saling berkelindan dengan tema dan ruang-waktu yang terus berganti. Tokoh-tokoh politik menjadi sasaran empuk kasus perselingkuhan, pernikahan siri dan hubungan asmara lain. Hasrat untuk menikmati tubuh⁴, merupakan isu serius di ruang kekuasaan.

Foucault dalam *La Volonte de Savoir: Historie de la Sexualite* (Ingin Tahu Sejarah Seksualitas: 2008), mengungkapkan bahwa, "seks dan kekuasaan menjalin hubungan negatif, berupa penyingkiran, larangan dan usaha untuk terus mengutuk menjadi hal tabu. Kekuasaan tidak dapat berbuat apapun pada seks dan kenikmatan kecuali berkata tidak; meskipun mengungkap, yang muncul hanya ketakhadiran dan absensi"⁵.

Di berbagai belahan bumi, sejak zaman Cleopatra hingga kini, warna kompetisi kekuasaan sering menghadirkan perempuan sebagai senjata untuk merusak citra politik tokoh publik. Perempuan sebagai penggoda untuk menghancurkan image pemimpin. Namun, ironisnya, arus wacana yang bergulir menempatkan perempuan sebagai "penggoda". Perempuan selalu dipersa-

³ Siti Solihati, *Wanita & Media Massa* (Yogyakarta: Teras, 2004), i.

⁴ Didik Nini Thowok, *Crus Gender* (Malang: Save Media, 2005), viii.

⁵ Munawir Aziz, "Episode Cicak Vs Buaya", *Suara Merdeka.com*, 4 November 2009.

lahkan, perempuan sebagai setan.⁶

Akan halnya Rani Juliani, istri ketiga korban pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen, yang pada hari Kamis 12 November memberikan wawancara eksklusif di Metro TV, tak urung juga mendapat 'tuduhan' serupa, bahkan oleh media massa. Padahal dari sisi penampilan, dia tampil tenang dan percaya diri dalam wawancara dan konferensi pers yang disiarkan langsung itu, kesannya jauh dari binal atau jalang.

Rani yang diduga diumpangkan oleh suaminya pada Antasari untuk mempercepat turunnya SK pengangkatan Nasruddin sebagai direksi RNI, dengan penuh percaya diri menyatakan keyakinannya bahwa Antasari-lah dalang pembunuhan suaminya. Kesimpulan itu didasarkan dari sms-sms teror yang dikirim kepadanya dan kepada suaminya. Juga pesan yang disampaikan oleh suaminya ketika masih hidup, bahwa bila dia terbunuh, maka Antasari-lah pelakunya.

Pemberitaan tentang perempuan dalam episode Cicak *Vs* Buaya,⁷ menjadi semacam pembenaran bagi asumsi Eriyanto, di mana menurutnya, wartawan media massa cenderung memilih seperangkat asumsi tertentu yang berimplikasi bagi pemilihan judul berita, struktur berita, dan keberpihakan kepada seseorang, meskipun sering bersifat subtil. Dampaknya, audien terdoda untuk mengikuti definisi yang ditanamkan media dimaksud sehingga mampu mengubah definisi yang sudah ada sebelumnya tentang realitas sosial atau memperteguh asumsi sebelumnya⁸.

Seperti yang terjadi pada pemberitaan tentang keberadaan para perempuan yang dituding telah melatarbelakangi keberadaan kasus Cicak *Vs* Buaya. Puluhan orang memberikan komentar senada di bawah berita yang disajikan Inilah.com tentang peran Rani Juliani, istri ketiga korban terbunuh, Nasruddin Zulkarnain, sebagaimana terlampir. Senada dengan media berita tersebut, perempuan muda ini digambarkan telah menjadi pemicu berkobarnya peperangan antara dua lembaga negara yang terhormat, KPK dan Polri; menjadikan tertumpahnya darah seorang pengusaha muda sukses- Nasruddin Zulkarnaen serta membuat *the rising star*-pemberantas korupsi, Antasari,

⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 10.

⁷ "Sensualitas Rani Juliani", *inilah.com*, 7 November 2009.

⁸ Eriyanto, *Analisis Framing: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: LKiS, 2005), xi.

sebagai pesakitan di bui.

Begitu luar biasakah peran dan sosok *caddy* yang sejatinya tidak secantik pesinetron Tamara Blezinsky atau seseksi penyanyi Aura Kasih ini? Sampai-sampai pria dengan pendidikan dan kedudukan sosial-ekonomi tinggi bersedia pertaruhkan nyawa mendapatkannya?

Yasraf Amir dalam *Hipersemiotika*,⁹ menjelaskan betapa sebuah realitas versi media massa kadangkala menyajikan sesuatu yang jauh melampaui realitas alamiah sebenarnya. Informasi yang disebutkan sudah mengalami obesitas-di masa kini, membuat audience dikelilingi citraan dan imej yang mengepung dari segala arah. Akibatnya, identitas yang sebenarnya kian sulit dicakupkan dalam setangkai makna yang sederhana.

Pun dalam kasus yang melibatkan perempuan bernama Rani Juliani di episode *Cicak Vs Buaya* ini. Identitas Rani yang merupakan istri ketiga Nasruddin berpolarisasi dengan cepat menjadi perempuan penggoda laki-laki dari kelas atas. Media telah merepresentasikan Rani dengan cara-cara tertentu, sehingga audience diarahkan kepada sebuah ide bahwa dia masuk dalam kelompok tertentu.¹⁰ Pengelompokan ini memunculkan stereotip-yakni representasi yang disederhanakan dari sosok dimaksud.

Identitas perempuan yang dikabarkan digandrungi mantan ketua KPK Antasari ini terbangun berdasarkan prinsip oposisi biner, di mana diletakkan sebagai pribadi yang mendominasi sehingga menciptakan kesan keberpihakan dengan mengunggulkan yang satu (Ida Laksmiwati-istri mantan ketua KPK-Antasari Ashar) dan melecehkan yang lainnya (Rani Juliani). Hal ini jelas bersebalik dengan wacana pluralisme yang terbentuk dari apa yang disebut Derrida sebagai ketidakberpihakan (*undecidable*).¹¹

Di mata feminis sosialis yang setuju dengan feminis Marxis, tentu sepakat pula bahwa fenomena Rani sebagaimana dicitrakan Inilah.com ini adalah buah dari bertahtanya budaya patriarki kapitalis atau kapitalisme patriarkal. Mereka ini berpandangan bahwa kapitalisme adalah sumber opresi terhadap perempuan. Pendapat meremka senada dengan kalangan feminis radikal yang berasumsi untuk segera menyudahi opresi terhadap perempuan

⁹ Yasraf Amir Piliang, *Hipersemiotika* (Bandung: Jelasutra, 2004), 9.

¹⁰ Graeme Burton, *Yang Tersembunyi di Balik Media* (Bandung: Jelasutra, 2008), 115.

¹¹ Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat* (Bandung: Jelasutra, 2004), 410.

membunuh kedua budaya patriarki di atas.¹²

Dijelaskan Kate Millet dalam tulisannya; *Sexual Politics*, ketika terjadi operasi terhadap kemanusiaan atas dasar ekonomi, kelas, ras, politik, maka perempuan-lah yang tetap merupakan kelompok yang dapat diopresi, bahkan ketika mereka (Rani) sedang berada dalam posisi superior (karena diperebutkan para pria 'berkelas') dalam banyak aspek dibanding laki-laki.

Penjelasan yang masuk akal terhadap fenomena 'pendangkalan' atau stereotip terhadap Rani (baca; perempuan) adalah relasi kuasa dan kekuasaan yang mengonstruksi sedemikian rupa sehingga ia tetap merupakan kelompok manusia yang sekunder, yang marjinal dan subordinat terhadap laki-laki.¹³ Oleh karenanya, untuk mempercepat relasi heteroseksual yang lebih seimbang, harus ada dekonstruksi nilai-nilai, hak dan kewajiban khusus yang tidak menempatkan satu pihak sebagai bagian yang 'lebih' daripada yang lain.¹⁴

Akar persoalan mengapa tuduhan mengarah kepada seorang Rani sebagai kambing hitam dalam berita Cicak Vs Buaya tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Rani dikategorisasi sebagai perempuan yang normal. Ini berarti Rani adalah Monster yang layak ditakuti. Mengacu pada film *Aliens*, ada ketakutan dunia (laki-laki) terhadap klitoris perempuan, laiknya ketakutan mereka terhadap monster.

Sebagaimana disebutkan Freud, untuk menjadi normal, perempuan harus memindahkan *love object* dari klitoris ke vagina. Dalam hal ini, perempuan yang semula dapat berpartisipasi aktif secara seksual dengan klitorisnya, harus berubah pasif karena fungsi seksualnya dipindah ke vagina. Alasannya, kenikmatan seksual dalam konteks seksual berpusat pada penis.¹⁵

Lebih daripada itu, ketakutan ini juga menandakan bahwa konstruksi perempuan sebagai monster yang ditakuti. Perempuan yang berklitoris adalah perempuan yang menyadari hasrat dan seksualitasnya-mungkin ini juga terjadi pada sosok Rani. Padahal menurut konstruksi yang sama, perempuan

¹² Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, terj. (Bandung, Jalasutra, 2008), 6.

¹³ Emy Susanti Hendrarso, *Ketimpangan Gender & Ketidakberdayaan Perempuan Miskin Perkotaan* (Surabaya: Insan Cendekia, 2008), 2.

¹⁴ Aquarini Priyatna Prabasmoro, *Kajian Budaya Feminis* (Bandung: Jalasutra, 2006), 32.

¹⁵ *Ibid.*, 126.

tidak selayaknya berhasrat, yang berhasrat adalah monster.

Nah, Rani, digambarkan media telah sukses membangkitkan (mungkin juga dibangkitkan) hasrat biologis, hasrat asmara, hasrat libido, Nasaruddin dan Antasari sekaligus. Kedua pria mapan ini digambarkan sangat bergairah kepada Rani, bedanya, Nasaruddin berhasil memperistrinya (atau Rani berhasil menggaetnya sebagai suami) sedangkan Antasari berhasil membawa mantan *caddy* tersebut ke kamar hotel untuk kencan (atau dengan pembacaan lain, Rani sukses menarik libido Antasari hingga bersedia masuk kamar hotel berdua).

Pembacaan berbeda ini, mengacu kepada pemikir feminis seperti Beauvoir, Millet, Oakley dan Hyde, yang berujung kepada ketiadaan tempat bagi hasrat, berahi, penderitaan dan tubuh perempuan dalam budaya patriarki. Seksualitas perempuan seringkali dipahami ambivalen sehingga menjelma sebagai mitos.¹⁶ Peminggiran seksualitas perempuan dan pembentukannya sebagai mitos merupakan bukti bahwa konstruksi sosial pada dasarnya merupakan konstruksi penguasaan terhadap seksualitas perempuan.”Tubuh perempuan secara intrinsik berhubungan erat dengan sentralitas tubuh terhadap subjektivitas, seksualitas dan politik kekuasaan. Eksistensi perempuan adalah sebagai monster dalam hukum patriarki,” demikian Armitt.¹⁷

Seksualitas seorang Rani, membuat masyarakat patriarki, termasuk media, sebagai sumber daya tarik, sumber ketakutan serta sumber rasa ingin tahu sekaligus. Ketakutan tersebut jelas tergambar dari pendeskreditan Rani dalam banyak penyebutan namanya di beragam berita terkait *Cicak Vs Buaya*, sebagaimana terefleksi dalam lirik lagu ciptaan Ismail Marzuki: *Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria berkuasa, tekuk lutut di sudut kerling wanita.*

Dengan ambivalensi ini, tubuh dan hasrat perempuan dimaknai sebagai monster, sebagai *vagina dentata*, yakni sebuah gerbang yang lembut, sensual dan menggoda tetapi penuh dengan gigi gerigi yang siap menerkam dan menghabisi apa-pun yang tergoda memasukinya. Menurut Freud, *vagina dentata* adalah ketakutan universal yang tersembunyi di dalam ketidaksadaran

¹⁶ *Ibid.*, 142.

¹⁷ *Ibid.*, 222.

setiap laki-laki. Ia menurutnya juga merepresentasi ketakutan kehilangan diri (laki-laki) terisap oleh kekuatan yang tidak dikenal, yang penuh lorong dan gelap, yakni tubuh dan seksualitas perempuan.¹⁸

Pelembagaan seksualitas laki-laki sebagai norma, termasuk norma media ini, menyebabkan seksualitas perempuan dan laki-laki tak pernah dilihat partikular dan plural. Pasalnya menurut Foucault dalam *History of Sexuality*-nya, seksualitas saling berkaitan antara ras, masyarakat, kelas, budaya, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, karenanya, wacana tentang hal tersebut tidak pernah sederhana.¹⁹

Pudar Wijayanti, dalam penelitiannya tahun 2010 silam, berjudul Perempuan dalam Berita Perkosaan (Analisa Isi Tentang Perbedaan Penyajian Isi Berita Perkosaan dalam Menggambarkan Posisi Perempuan pada Koran Merapi Pembaruan dan Koran Meteor Periode Februari-Maret 2010), Penelitian tersebut melakukan pembuktian mengenai kemungkinan adanya perbedaan penyajian berita perkosaan dalam menggambarkan posisi perempuan pada koran Meteor dan Koran Merapi Pembaruan periode Februari-Maret 2010. Koran Merapi Pembaruan dan Koran Meteor merupakan “koran kuning”, yaitu koran yang memiliki isi dalam bentuk sensasional melaporkan kejadian-kejadian yang menyangkut kekerasan, seks, dan kejahatan kriminal.

Salah satu berita yang dinilai menarik menurut format “koran kuning” adalah berkaitan mengenai kekerasan dan seksual. Sementara itu, berita perkosaan yang mengandung unsur seksual dan kekerasan sering menjadi pilihan untuk menarik pembaca. Sedangkan dalam kasus perkosaan yang menjadi korban seringkali adalah perempuan. Tetapi dalam hal ini perempuan kembali menjadi korban, sebab dalam pemberitaannya yang mengutamakan sensasional seringkali bias. Bias terjadi ketika perempuan dalam berita perkosaan tidak diposisikan sebagai “subjek” dalam berita melainkan hanya diposisikan sebagai “objek”.

Lebih parah lagi penggambaran Kompas, pada 4 Mei 2013, yang menulis tentang “Perempuan Cantik Merusak Kesehatan Anda”. Media terse-

¹⁸ <http://www.rotten.com/library/sex/vagina-dentata/>, diakses 20 Januari 2010

¹⁹ Michael Foucault, *History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1, Robert Hurley (Terj) (New York: Vintage Books, 1990), 11.

but mengutip sebuah penelitian dari University of Valencia, sebuah universitas tertua dan terbesar di Spanyol, menyebutkan, berada lima menit hanya berdua dengan seorang perempuan cantik dapat meningkatkan level cortisol, hormon stres tubuh, pria. Efek ini meningkat pada pria yang percaya bahwa perempuan tersebut "di luar jangkauan mereka'.

Cortisol diproduksi tubuh yang mengalami stres fisik atau psikologis dan telah dikaitkan dengan penyakit jantung. Telegraph, Senin (3/5), dikutip Kompas, melaporkan, para peneliti telah menguji 84 mahasiswa pria dengan meminta mereka duduk di sebuah ruangan dan memecahkan teka-teki Sudoku. Dua orang asing, satu laki-laki dan satu perempuan, juga ada di dalam ruangan tersebut. Ketika perempuan asing itu meninggalkan ruangan dan dua orang pria itu tetap duduk di sana, tingkat stres kedua relawan pria itu tidak muncul. Namun, ketika seorang relawan pria tinggal sendirian dengan si perempuan asing yang cantik, tingkat cortisol-nya meningkat.

Para peneliti tersebut menyimpulkan, "dalam penelitian ini, kami menilai bahwa bagi sebagian besar pria, kehadiran seorang perempuan cantik dapat menyebabkan persepsi bahwa ada kesempatan untuk pacaran. Sementara sejumlah pria mungkin menghindari perempuan yang atraktif karena berpikir, mereka 'tidak mungkin dapat memacari perempuan tersebut', mayoritas akan merespon dengan kecemasan dan sebuah respons hormonal yang terjadi berbarengan." Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat cortisol pria meningkat setelah terjadi kontak sosial singkat selama lima menit dengan seorang wanita muda yang menarik.

Perempuan Biasa dengan Kiprah Luar Biasa

Shahnaz Haque, penulis buku, bintang iklan dan artis, menulis, banyak perempuan Indonesia yang hebat. Sayangnya tidak terekspose layaknya para perempuan di atas. Misalnya Kiswanti, perempuan sederhana asal Bantul yang hanya lulusan SD. Dia rela mengayuh kilometer demi kilometer setiap harinya hanya untuk meminjamkan buku koleksinya kepada siapapun yang ditemuinya. Tanpa pamrih, tanpa embel-embel apa pun. Jatuh bangun dalam arti sesungguhnya, sering kali dia alami. Namun, Kiswanti sang pendobrak pikiran, tak pernah mengeluh, apalagi menyerah.

Seperti halnya Anne Avantie, sang pendobrak kreasi, yang kini sukses

sebagai desainer papan atas. Kisah perempupuan Semarang ini juga tak mudah. Mesti ditipu dan kehilangan panutan, dengan semangat dia terus berkarya, mengabadikan budaya kebaya Indonesia hingga ke taraf multinasional. Jelas bukan prestasi yang mudah diraih. Tak beda dengan perjuangan Ani Ema Susanti, seorang mantan TKW yang berhasil mewujudkan mimpinya menyelesaikan kuliah dari perjuangannya menjual keringat di negeri orang. Tak sampai di situ, kini Ani, sang pendobrak mimpi, bahkan merambah dunia sineas di tanah air.

Perjuangan dari *zero to hero* ini juga dilakukan oleh seorang pengusaha keripik balado asal Padang, Christine Hakim, sang pendobrak bisnis. Bayangkan saja, berbekal dua kilogram singkong, kini dia bukan hanya berhasil bertransformasi menjadi pengusaha tapi juga memberdayakan lingkungan sekitarnya agar ikut maju bersamanya.

Lalu ada Tiara Savitri yang separuh hidupnya berisi perjuangan melawan Lupus, penyakit yang masih belum diketahui penyebab dan obatnya. Kini Tiara justru mengabdikan hampir seluruh waktunya untuk para penderita lupus, bahkan dia dinominasikan sebagai salah satu penerima *award* kemanusiaan di bidang kesehatan di Kanada tahun 2010. Tiara, sang pendobrak vonis, bukan satu-satunya perempuan yang berhasil *go international*, seorang penyanyi keroncong dan langgam Jawa terkenal asal Solo, Waldjinah, sudah lama “mengirim” suaranya ke luar negeri. Meski di dalam negeri, musik keroncong yang dianggap usang justru sudah tak begitu populer, namun perempuan sang pendobrak seni ini terus berdedikasi pada apa yang dia percaya sebagai dunianya.

Ada pula wanita yang hidup di perkebunan Jember utara, Sulanah, 28. Sama seperti puluhan perempuan desa Kemiri lainnya, pagi buta, sekitar pukul 16.00 Wita, berjalan menyusuri jalan menanjak nan berbatu sebesar kepala bayi. Di tengah halimun yang menutupi permukaan tanah, Sulanah bersama para tetangganya menempuh jarak puluhan kilometer dengan kurun 2 jam, guna menyemprit (membuang rumput liar di seputar pohon kopi). Ibu dua anak tersebut mendapatkan upah sebesar Rp3-5 ribu jika mampu bekerja selama tujuh jam diperkebunan, minus perjalanan pulang-pergi.

Diakuinya, upah yang diterimanya tidak mencukupi untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar diri dan dua anaknya. Namun Sulanah tak punya

pilihan lain, kala suaminya merantau ke Pulau bali sebagai buruh bangunan, maka dirinya tak bisa menghindar dari kesehariannya saat ini. “Saya tak punya pilihan lain, tak banyak pekerjaan yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan upah di desa ini. Upah yang saya terima itu cukup untuk ‘sangu’ anak saya yang kelas tiga SD, dia sehari butuh uang jajan Rp 2 ribu. Seribu sisanya saya tabung untuk beli beras.”

Tak ada keluhan di mulut wanita yang tidak tamat sekolah dasar tersebut. Di desa di mana dia lahir, perempuan lain yang terhitung miskin seperti dirinya mempunyai rutinitas serupa, karenanya dia merasa tak ada yang perlu diprotes atau dipertanyakan atas nasib yang diterimanya.

Pun ketika penulis mencoba mengkonfirmasi, bahwa upah yang harus diterimanya seharusnya berkisar Rp 18 ribu per 7 jam kerja, sebagaimana disebutkan Suwandi, salah seorang ‘Sinder’ atau mandor besar di perkebunan kopi milik Woti-sebuah perusahaan perkebunan milik swasta nasional di Kemiri, Sulinah tak hendak protes atau semacamnya. “Saya dikasih pekerjaan saja sudah untung, buat apa protes mbak,” sebutnya.

Hanya saja, Sulinah menyayangkan ketika perusahaan perkebunan daerah (PPD) mencabut kebijakan penggantian biaya untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja semisal terluka saat menyabit dan sebagainya. “Padahal teman yang luka di tangan dan kakinya sehingga harus dijahit di RS, cukup banyak jumlahnya. Setiap tahun rata-rata 3-5 orang. Biayanya cukup besar menurut kami, Rp 50-75 ribu untuk satu kali pengobatan. Belum lagi kalau harus menginap di rumah sakit. Dari mana kami dapat uang?”

Perempuan yang dinikahkan saat masih 15 tahun itu menghitung ulang pengeluaran dan pendapatannya ketika ditanyakan kekuatannya membiayai anak dan ibunya yang hampir buta, dalam kesehariannya. “Suami mengirimkan uang sekitar Rp 300 ribuan tiap dua atau tiga bulan sekali. Untuk makan sehari-hari saja, tentu tidak cukup bagi kami berempat di sini. Karenanya saya menyambung hidup dengan mencari upah di perkebunan. Kalau musim petik kopi ya memetik kopi, musim penghujan seperti sekarang ya *menyempri*,” paparnya sembari memandang pegunungan Argopuro yang tegak menjulang di hadapan kami, awal Februari 2008.

Penulis mengikuti pandangan perempuan 1,45 an Cm berkulit kecoklatan itu. Wah, sungguh luar biasa stamina perempuan itu. Dia berjalan kaki

dengan sepatu boot hitam kusamnya itu tiap hari, menempuh jalan naik turun yang cukup ekstrim. Kalau dibandingkan dengan penulis, jelas dia sangat perkasa. Untuk menemui Sulana, penulis menempuh perjalanan yang relatif landai namun memakan waktu hampir dua jam untuk jarak tempuh 5 kilometer sejak jalan menikung dan menanjak di selatan Kemiri, itu pun dengan kendaraan roda dua. Wah, kami sungguh berbeda meski sama-sama perempuan dan ibu dari beberapa anak.

Meski hidup di pelosok desa dengan fasilitas seadanya, tanpa kendaraan bermotor, tanpa alat elektronik selain televisi dan radio transistor mini, Sulana bercita-cita putra-putrinya bisa sekolah tinggi. “Paling tidak bisa lulus SD, bisa sekolah sampai SMA lalu menjadi guru. Tapi kalau yang perempuan cukup lulus SD saja, setelah itu menikah dan ikut suaminya.

Membaca Posisi Perempuan Indonesia

Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979, sampai diratifikasi Indonesia melalui UU no 7 Tahun 1984, belum berekses secara signifikan. Indikasinya, hutang kepada perempuan dalam bentuk beban hidup sehari-hari masih ditanggung perempuan seorang. Dalam masyarakat tradisional seperti kebanyakan ditemukan di Indonesia, perempuan masih jadi pemikul terbanyak beban hidup ini. Padahal ceramah atau tulisan mengenai teori dan teologi lelaki dan perempuan dikategorikan sebagai dua kutub semartabat yang korelatif dari suatu perkara tunggal yang selaras, kenyataan real empiris historisnya masih jauh panggang dari api.

Mengacu pada banyak kasus kekerasan dan ketidakadilan pada perempuan yang terjadi pada kelompok masyarakat dengan kelas sosial rendah, hanya perempuan taipan saja yang dapat mendudukan dirinya selaras dengan pria. Saporinah Sadli dalam tulisannya yang berjudul Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia melihat esensi pengertian kelamin dan jender sering disalahartikan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini sering berdampak pada pembagian kerja seksual di ranah domestik sampai publik. Stereotip jender dan pembagian peran yang berkembang dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap terjadinya diskriminasi terhadap wanita, bahkan mengancam wanita dengan aneka kekerasan.

Padahal menurut Omas Ihromi, berbagai peraturan perundangan di RI telah melarang terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Namun kenyataan empirik menunjukkan bahwa wanita lah kelamin yang paling banyak mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Karenanya, Omas mengkritisi pandangan yang mengatakan bahwa hukum yang diterapkan menurut apa yang terumus di dalamnya akan membawa keadilan. Menurutnya, hubungan antara hukum dan keadilan tidak demikian kausal sifatnya. Alasannya, hukum tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang berlangsung ketika hukum dibuat. Hanya saja, dia masih sangat percaya bahwa memberikan keadilan kepada perempuan dapat dilakukan melalui hukum, dengan memperhatikan perubahan sosial dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Senada dengan Omas, Nursyahbani melihat bahwa hukum sering dijadikan sarana untuk merampas sumberdaya ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hukum lebih berfungsi melanggengkan proses pemiskinan.”Dalam kenyataannya, hukum tidak netral dan asumsi bahwa hukum adalah sebuah institusi untuk memperoleh keadilan harus dipertanyakan kembali. Seharusnya wanita tidak menaruh kepercayaan yang besar kepada hukum. Alasannya, nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas wanita dan nilai yang mencerminkan ketidaksetaraan jender, mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan hukum.

Sementara itu, Koesparmono Irsan, mantan perwira tinggi polisi, melihat alasan mendasar pada tindakan kekerasan yang justru dilakukan pejabat yang seharusnya melindungi wanita. *Pertama*, politik dan hukum itu sendiri mengandung dimensi kekerasan struktural. Hal ini dipicu perbedaan kepentingan antara penegakan hak asasi manusia atau dijalankannya program atas nama pembangunan. *Kedua*, banyak peraturan perundangan yang tidak mencerminkan HAK. *Ketiga*, tidak berfungsinya kontrol sosial oleh semua pihak. Dalam hal ini kekerasan juga digunakan untuk penyelesaian konflik yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan di bidang politik, sosial dan ekonomi.

Diakuinya, dalam perkara kekerasan, pada umumnya masyarakat lebih memberi perlindungan terhadap pelaku daripada korban. Korban banyak yang tidak tahu hak-haknya sehingga takut melapor. Di sisi lain, penegak hukum tidak tahu hak-hak korban sehingga sudah puas manakala sudah mam-

pu menegakkan hak-hak pelaku kejahatan.”Perlindungan terhadap individu korban kejahatan justru ditelantarkan oleh banyak pejabat publik. Sementara penjahat dipelihara, dilindungi dan dirawat oleh pemerintah. Merehabilitasi korban kejahatan, terutama wanita, menjadi sulit karena kaena yang harus dibangunkembali adalah rasa susila dan moralitasnya yang terpuruk akibat kejahatan.

Dikotomi Publik Vs Domestik

Sementara itu, pembagian peran secara seksual yakni dengan menempatkan wanita di rumah dan laki-laki di luar rumah, menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi, perempuan menjadi sangat tergantung kepada suaminya. Walaupun bekerja, tidak dipandang sebagai manusia yang utuh karena dianggap hanya sebagai pencari tambahan penghasilankeluarga. Akibatnya, perempuan, bahkan pada perempuan PNS, seringkali dianggap tetap lajang sekalipun telah menikah sehingga tidak berhak menerima tunjangan keluarga dan kesehatan karena dianggap telah mendapatkannya dari suaminya.

Ironisnya, pada sistem kapitalisme global yang merajai Indonesia saat ini, kaum perempuan diletakkan sebagai sumber tenaga kerja murah. Celakanya, wanita juga harus mengalami diskriminasi upah dengan laki-laki yang juga baerupah rendah. Ini berarti bahwa kaum wanita memperoleh perlakuan lebih buruk di dunia kerja, bahkan kekerasan dan pelecehan seksual, sebagaimana pada kasus buruh Marsinah yang dibunuh karena menuntut kenaikan upah.

Secara politik, perempuan juga dianggap sekunder dan tidak punya otonomi. Suamilah yang menjadi kepala keluarga, yang menentukan urusan yang bersifat publik. Karenanya, wanita dianggap milik pria, sehingga pemukulan, penyiksaan psikis dan fisik, penelantaran dan perkosaan dalam keluarga (*marital rape*), tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Posisi wanita di ranah politik tak kalah mengenaskan. Konstruksi sosial menempatkan wanita tak bisa aktif dalam politik. Pria tak menginginkan Aisyah Amini menjadi Ketua PPP pada Kongres ke III-nya karena dia perempuan. Padahal tak ada yang mampu mengalahkannya dalam hal ketokohan, pengalaman dan kemampuan manajerialnya.

Kenyataannya, wanita jarang mendapatkan tempat yang pantas dalam setiap kegiatan. Posisi ketua atau wakil ketua pasti ditempati pria, wanita cukup di sie konsumsi saja. Sayang, wanitanya juga tak protes sehingga perlakuan ini menuju keabadian. Padahal wanita selalu bisa diandalkan sebagai instrumen kekuasaan, seperti kasus dharma wanita, wanita karya, wanita Kosgoro dan lain-lain di bawah Golkar.

Dalam ranah ekonomi tak kalah mengesankan. Menurut Unesco, kontribusi wanita terhadap ekonomi mencapai 60 persen. Bentuknya berupa waktu yang nmerekagunakan untuk rumah tangga yang jelas tidak dibayar. Namun apa yang didapat wanita, mereka hanya mendapat 30 persen dari 60 persen yang diberikan.

Memang benar, ada yang hilang dalam dunia wanita, yaitu dalam dunia pergerakan. Meski dalam dunia pendidikan wanita relatif setara, namun pendidikan tidak menciptakan kepemimpinan. Pemimpin hanya dapat diciptakan oleh pengalaman, yang ini sulit didapatkan karena hambatan budaya dan struktural. Penganut sistem ini percaya bahwa An-nisa' ayat 1 tentang *nafsin wahidatin* bermakna Hawa dari tulang rusuk Adam, bukan sebagai species yang sama (homo sapien).

Upaya Menempatkan Wanita Sesuai Fitrah

Konfrensi HAM se dunia di Wina tahun 1993 tak mudah diterapkan di Indonesia. Hal ini karena kendalanya berupa struktural menyangkut sikap masyarakat yang enggan mengakui antara hak perempuan dan pria. Sikap ini seringkali dikuatkan oleh berbagai ajaran agama, adat dan budaya. Tragsinya, pasalnya, sikap ini diadopsi menjadi sikap resmi negara sebagaimana tercantum pada penjelasan UU nomor 7 tahun 1984 yang berbunyi; Dalam pelaksanaannya, konvensi tentang pengesahan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita, wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai budaya, adat dan norma yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Namun demikian, dalam 20 tahun terakhir, gerakan perempuan yang menempuh jalur hukum untuk mengubah stigma dan stereotip yang merugikan, terus berlangsung. Walau telah dicapai kemajuan yang cukup berarti, namun aplikasinya masih terhambat oleh mekanisme kontrol oleh negara.

Akibatnya, hukum yang sudah ada hanya sekedar formalitas saja sehingga tidak berhasil mewujudkan perubahan sosial.

Di lain pihak, wanita umumnya belum mengetahui bahwa ada perangkat hukum yang dapat membantu dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Saparinah Sadli melihat, untuk mewujudkan kesadaran jender, diperlukan pendidikan hukum bagi tiap perempuan agar dapat mengetahui dan menggunakan peraturan-peraturan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Penutup: Solusi Sementara bagi Perempuan Obyek Penderita

Saran penulis agar Rani (dan para perempuan lain) tidak terus menerus 'tertuduh' sebagai biang kerok, maka dia harus menampilkan diri sebagai ibu atau perempuan yang baik-baik, tidak jalang. Sebagaimana ditulis Laurie J Sears-*Fantasizing the Feminine in Indonesia*, hubungan negara dan seksualitas perempuan di Indonesia mengarah kepada suatu kekerasan atas perempuan yang dianggap 'tidak baik-baik'. Karenanya, dengan memperlihatkan diri di media sebagai perempuan baik-baik, akan mengurangi stereotip pada perempuan obyek penderita.

Saran penulis lainnya, perempuan yang tereksplorasi di media, segera membangun citranya sebagai ibu, karena menurut Julia Suryakusuma, seksualitas perempuan Indonesia dibangun atas konstruksi *ibuisim*. Konstruksi ini mewajibkan perempuan ini untuk antara lain, menampilkan wajah tertentu, yakni; perempuan yang mendukung karir dan tugas suami, menjadi ibu rumah tangga yang baik serta menjadi penjaga masyarakat.²⁰

Saran penulis yang terakhir, para perempuan obyek penderita selainnya menghindar sejauh mungkin dari citra sebagai perempuan yang seksi, sensual. Dengan demikian dapat menghindar dari kesan jalang, tak bermoral. Mereka akan terhindar dari 'tuduhan' media sebagai *femme fatale*, perempuan perusak rumah tangga orang atau mencemari serta mengancam laki-laki dari kalangan baik-baik yang menyayangi keluarganya.²¹ Dengan menampilkan citra di atas, Rani akan tampil sebagai perempuan, ibu, yang bertanggung jawab atas 'moralitas' yang ingin diusung negara, di mana laki-laki direpre-

²⁰ Sarasawati Sunindyono, "Murder, Gender and the Media", dalam Laurie J Sears (ed), *Fantasizing the Feminine in Indonesia* (New York: Duke University Press, 1996).

²¹ Aquarini, 315.

sentasikan sebagai negara. @ *Wallaahu A'lam Bis Showab*.

Daftar Pustaka

- "Sensualitas Rani Juliani", *inilah.com*, 7 November 2009
- Aziz, Munawir, "Episode Cicak Vs Buaya", dalam *Suara Merdeka.com*, 4 November 2009.
- Burton, Graeme, *Yang Tersembunyi di Balik Media* (Bandung: Jelasutra, 2008)
- de Beauvoir, Simone, *Perempuan yang Dibancurkan* (Yogyakarta: Bentang, 2003).
- El Saadawi, Nawal, *Perempuan dalam Budaya Patriarki* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- El Saadawi, Nawal, *Tak Ada Tempat bagi Perempuan di Surga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Engineer, Ali, Asghar, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2003).
- Eriyanto, *Analisis Framing: Suatu Pengantar* (Yogyakarta, LkiS, 2005).
- Foucault, Michael, *History of Sexuality: An Introduction*, Vol.1, Robert Hurley (Terj) (London: Vintage Books, 1990).
- Gardiner, Mayling Oey, dkk, *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini* (Jakarta: Gramedia, 1996).
- Hendrarso, Emy Susanti, *Ketimpangan Gender & Ketidakeberdayaan Perempuan Miskin Perkotaan* (Surabaya: Insan Cendekia, 2008).
- Hidayat, Nur, *Kontroversi Presiden Wanita* (Surakarta: PT Pabelan, 1998).
- <http://www.rotten.com/library/sex/vagina-dentata/>, diakses 20 Januari 2010
- Ihromi, Tapi Omas dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan* (Bandung: Alumni, 2000).
- Irwan, Alex, *Perisai Perempuan* (Yogyakarta: LBH-APIK, 1999).
- Katjasungkana, Nursyahbani, Dkk, *Potret Perempuan* (Yogyakarta: PSW UMY-Pustaka Pelajar, 2001).
- Piliang, Yasraf Amir, *Dunia yang Dilipat* (Bandung: Jelasutra, 2004).
- Piliang, Yasraf Amir, *Hipersemiotika* (Bandung: Jelasutra, 2004).
- Prabasmoro, Aquarini Priyatna, *Kajian Budaya Feminis* (Bandung: Jelasutra, 2006).
- Sharma, Arvind (editor), *Perempuan dalam Agama-agama Dunia* (Jakarta: Dittais- CIDA, 2002).

- Solihati, Siti, *Wanita & Media Massa* (Yogyakarta: Teras, 2007).
- Subadio, Maria Ulfah-TO Ihromi, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994).
- Sunindyo, Sarasawati, "Murder, Gender and the Media", dalam Laurie J Sears (ed), *Fantasizing the Feminine in Indonesia* (New York: Duke University Press, 1996).
- Thowok, Didik Nini, *Cross Gender* (Malang: Save Media, 2005).
- Tong, Rosemarie Putnam, *Feminist Thought*, terj. (Bandung: Jalasutra, 2008).

